



ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI DKI JAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2019-2023

ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF DKI JAKARTA PROVINCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC FROM 2019 TO 2023

Chanli¹, Atri Nodi Maiza Putra²

^{1,2}Universitas Bina Sarana Informatika

Email : chanli552.cl@gmail.com¹, atri.tnm@bsi.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 18-08-2024

Revised : 23-08-2024

Accepted : 25-08-2024

Published: 28-08-2024

Abstrack

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the financial performance of the DKI Jakarta region. Regional financial performance refers to the ability of local governments to manage revenues and expenditures to support community welfare and local economic development. During the pandemic, locally-generated revenue experienced a sharp decline due to reduced economic activity, decreased taxes, and levies. This caused significant pressure on the regional budget, hindering their ability to provide optimal public services. To mitigate the negative economic impact of the pandemic, the regional government implemented various economic recovery policies. These policies include social assistance for affected communities and increased government spending on infrastructure projects to stimulate the economy. Additionally, the regional government is expected to make budget adjustments by reallocating funds from less urgent programs to more critical sectors, such as health and economic recovery. Through the analysis of financial data and economic policies, it is hoped that the factors influencing regional financial performance can be identified, as well as the best strategies for economic recovery. However, challenges remain, including the need to strengthen transparency and accountability in regional financial management and to enhance the effectiveness of economic recovery policies to ensure long-term financial stability.

Keywords: *Financial Performance Analysis, Regional Revenue and Expenditure Budget, Covid-19 Pandemic*

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah DKI Jakarta. Kinerja keuangan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal. Selama pandemi, pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan yang tajam karena berkurangnya aktivitas ekonomi, penurunan pajak, dan retribusi. Hal ini menyebabkan tekanan besar pada anggaran daerah, menghambat kemampuan mereka untuk memberikan layanan publik yang optimal. Untuk mengatasi dampak ekonomi negatif yang ditimbulkan oleh pandemi, pemerintah daerah menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi. Kebijakan ini meliputi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, serta peningkatan belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur guna merangsang perekonomian. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan penyesuaian anggaran dengan cara mengalihkan dana dari



program-program yang kurang mendesak ke sektor-sektor yang lebih penting, seperti kesehatan dan pemulihan ekonomi. Melalui analisis data keuangan dan kebijakan ekonomi, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan strategi terbaik untuk pemulihan ekonomi. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, termasuk perlunya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi guna memastikan stabilitas keuangan jangka panjang.

Kata Kunci: Analisis Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah membawa dampak yang luar biasa pada berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara sekaligus pusat perekonomian Indonesia, tidak terlepas dari dampak tersebut. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan serius terhadap perekonomian, yang berdampak langsung pada kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama periode 2019-2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian dan tekanan yang terus meningkat, beberapa peraturan, termasuk PP No 2 Tahun 2020 tentang Regulasi berubah menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 2020 menjelaskan rencana Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan saat menangani Virus Covid-19 untuk melawan bahaya pada Perekonomian Nasional dan Stabilitas. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 ini bertujuan untuk melindungi kehidupan masyarakat yang sangat rentan terhadap pandemi ini.

Penurunan drastis aktivitas ekonomi selama pandemi, yang dipicu oleh penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan-kebijakan pembatasan lainnya, telah mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan ekonomi ini juga disertai dengan akibat ekonomi lainnya, seperti karyawan yang terpaksa dirumahkan hingga meningkatnya pengangguran. (katadata.co.id). Dalam Artikel (Puji wibowo 2022) Pandemi Virus COVID-19 terkena oleh dampak pada kegiatan ekonomi Pemerintah DKI Jakarta. Sering kali kegiatan perekonomian di Indonesia merupakan kontributor terbesar dalam skala nasional. Ekonomi nasional ini secara tidak langsung diperbuat oleh perekonomian Pemerintah DKI Jakarta. Pada saat 2020, ekonomi DKI Jakarta mengalami penurunan pertumbuhan. Penurunan ini diakibatkan oleh melemahnya daya beli masyarakat yang berakibat dari kebijakan PSBB, berbagai sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi, dan kontribusi dari sektor swasta, mengalami penurunan tajam. Kondisi ini menempatkan tekanan besar pada anggaran daerah, mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, pemerintah daerah harus beradaptasi dengan situasi ini melalui serangkaian penyesuaian kebijakan fiskal dan strategi pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana.

ADO (Asian Development Outlook) 2020, virus COVID-19, seiring dengan pengurangan harga barang yang ada di pasar keuangan berdampak buruk pada ekonomi global Indonesia, dimana usaha dagang Indonesia diprediksi terkena dari dampak buruk suatu kegiatan ekonomi di saat ini. Permintaan dalam negeri juga bisa diprediksi akan menurun seiring dengan melemahnya sentimen konsumen & bisnis. Namun, seiring dengan Recovery ekonomi global, perkembangan



ekonomi di negara Indonesia diprediksi akan mendapatkan momentum yang bagus dan didukung oleh reformasi di bagian investasi yang dikeluarkan. Proses yang meningkatnya pencapaian rata-rata naik sedikit hingga 2022 dan akan diimbangi oleh penurunan biaya bahan bakar subsidi dan nonsubsidi, serta tambahan untuk listrik dan pangan. Di sisi lain, penerimaan ekspor dari pihak pariwisata dan komoditas di perkirakan akan melemah yang mengakibatkan defisit transaksi tidak berjalan dari Produk Domestik Bruto pada tahun 2022.

Selain itu, kebutuhan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar ke sektor kesehatan dan penanganan dampak sosial ekonomi dari pandemi juga menambah tekanan pada APBD. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk program-program pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek jangka panjang terpaksa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pengadaan alat kesehatan, pembangunan fasilitas karantina, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, serta dukungan untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Langkah-langkah penyesuaian ini diharapkan dapat membantu meredam dampak negatif pandemi sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi dan sosial di DKI Jakarta.

Penelitian terdahulu tentang kinerja keuangan daerah selama pandemi COVID-19 menunjukkan dampak yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Muhammad Ichlasul Amal (2022) menemukan bahwa pandemi menyebabkan penurunan rasio kemandirian keuangan dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 18,8% pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Meskipun rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, tingkat efisiensinya masih tergolong rendah, sehingga membutuhkan peningkatan lebih lanjut dalam manajemen keuangan daerah.

Fachenda Itsnain Naufal Zuhdi (2023) dalam penelitiannya mengenai APBD Jawa Timur tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi, dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan hanya sebesar 8,7%. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa biaya yang diperlukan untuk memungut PAD masih cukup besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan.

Sanchia Darlene Rawis (2020) dalam analisisnya terhadap kinerja keuangan APBD Sulawesi Utara menemukan bahwa meskipun ada pertumbuhan pendapatan daerah yang positif, desentralisasi fiskal masih belum mampu terlaksana dengan optimal, dengan rata-rata kurang dari 10%. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah belum mencapai tingkat kemandirian yang diharapkan, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti pandemi.

Penelitian yang dilakukan oleh Elizar Sinambela (2016) pada APBD Sumatera Utara mengindikasikan bahwa meskipun ada efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah, yang mencapai 140,3%, tantangan tetap ada dalam mencapai target anggaran dan memastikan alokasi anggaran yang efektif untuk belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Andriany Nasution (2023) di Kota Medan, yang mengungkap bahwa meskipun ada target pendapatan, realisasinya hanya mencapai sekitar 55%, mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini berupaya untuk lebih jauh mengeksplorasi bagaimana pandemi



memengaruhi kinerja keuangan daerah dan langkah-langkah yang diambil untuk pemulihan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan APBD Provinsi DKI Jakarta selama pandemi Covid-19, khususnya dari tahun 2019 hingga 2023. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pemerintah daerah merespons tantangan finansial yang muncul, strategi-strategi apa yang diterapkan untuk mengelola pendapatan dan belanja daerah, serta bagaimana efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini juga akan mengeksplorasi peran penting transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagai upaya untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran, serta untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, dalam hal ini dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan APBD Provinsi DKI Jakarta. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengukur dan menganalisis data numerik dari laporan keuangan daerah.

2. Objek dan Lokasi Penelitian

- a. Objek Penelitian: Kinerja keuangan APBD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023.
- b. Lokasi Penelitian: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data: Data sekunder yang berupa laporan keuangan APBD, data statistik ekonomi, dan laporan pendapatan asli daerah (PAD) dari Bapenda Provinsi DKI Jakarta.
- b. Sumber Data: Data diperoleh dari laporan resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dokumen APBD, serta publikasi terkait dari instansi pemerintah yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti APBD, laporan realisasi anggaran, serta data statistik ekonomi yang diterbitkan oleh Bapenda dan Badan Pusat Statistik (BPS).
- b. Observasi Tidak Langsung: Mengamati perkembangan ekonomi dan keuangan daerah melalui data yang diterbitkan secara online oleh instansi terkait.

5. Keabsahan Data

Triangulasi: Keabsahan data akan diperiksa melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Ini termasuk perbandingan antara data dari Bapenda, BPS, dan publikasi resmi lainnya.



6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- Teknik Pengolahan Data: Data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan perangkat lunak statistik untuk memudahkan analisis dan interpretasi.
- Teknik Analisis Data: Penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif statistik, dengan fokus pada analisis rasio keuangan seperti rasio solvabilitas, likuiditas, dan rasio pertumbuhan pendapatan. Analisis ini bertujuan untuk melihat tren perubahan kinerja keuangan APBD selama periode pandemi dan dampak dari kebijakan pemulihan ekonomi yang diimplementasikan.

7. Fokus Analisis

- Dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah.
- Efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi yang diimplementasikan pemerintah daerah.
- Keseimbangan anggaran dan perubahan prioritas alokasi anggaran selama pandemi.

HASIL PENELITIAN

Akun	Anggaran					Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	74.776,75 M	82.195,99 M	72.187,51 M	77.451,27 M	74.380,65 M	62.300,68 M	55.887,00 M	65.567,01 M	67.290,48 M	66.430,93 M
PAD	50.624,33 M	57.561,16 M	51.891,12 M	55.661,19 M	52.773,52 M	45.707,40 M	37.414,75 M	41.606,31 M	45.608,40 M	48.860,01 M
Pajak Daerah	44.180,00 M	50.170,00 M	43.375,00 M	45.702,55 M	43.600,00 M	40.298,12 M	31.895,26 M	34.575,56 M	40.275,15 M	43.523,12 M
Retribusi Daerah	710,13 M	755,76 M	755,76 M	806,88 M	600,00 M	587,38 M	496,33 M	383,86 M	376,98 M	435,87 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	757,63 M	750,00 M	660,35 M	793,74 M	542,50 M	619,46 M	672,49 M	398,79 M	402,42 M	545,87 M
Lain-Lain PAD yang Sah	4.976,57 M	5.885,41 M	7.100,02 M	8.358,02 M	8.031,02 M	4.202,44 M	4.350,67 M	6.248,09 M	4.553,85 M	4.355,21 M
TKDD	21.366,24 M	21.680,92 M	16.873,54 M	16.882,87 M	18.457,24 M	14.551,57 M	16.962,90 M	22.673,79 M	18.860,86 M	17.540,01 M
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	21.366,24 M	21.680,92 M	16.873,54 M	16.882,87 M	18.457,24 M	14.551,57 M	16.962,90 M	22.673,79 M	18.860,86 M	17.540,01 M
Pendapatan Lainnya	2.786,17 M	2.953,91 M	3.422,85 M	4.907,21 M	3.149,88 M	2.041,71 M	1.509,35 M	1.286,91 M	2.821,22 M	30,91 M
Pendapatan Hibah	2.786,17 M	2.953,91 M	3.422,85 M	4.907,21 M	3.149,88 M	2.041,71 M	1.509,35 M	1.286,91 M	2.821,22 M	30,91 M
Belanja Daerah	80.902,09 M	79.610,44 M	72.967,01 M	76.840,31 M	74.613,76 M	64.938,36 M	52.088,13 M	61.619,04 M	64.865,12 M	63.531,92 M
Belanja Pegawai	24.778,67 M	24.190,77 M	21.884,27 M	20.025,51 M	18.322,00 M	22.016,85 M	16.686,87 M	18.816,24 M	17.705,44 M	17.977,83 M
Belanja Pegawai	24.778,67 M	24.190,77 M	21.884,27 M	20.025,51 M	18.322,00 M	22.016,85 M	16.686,87 M	18.816,24 M	17.705,44 M	17.977,83 M
Belanja Barang Jasa	24.679,69 M	23.589,56 M	24.290,83 M	25.838,72 M	27.533,46 M	20.807,66 M	16.775,62 M	21.488,66 M	23.613,05 M	23.259,78 M
Belanja Barang dan Jasa	24.679,69 M	23.589,56 M	24.290,83 M	25.838,72 M	27.533,46 M	20.807,66 M	16.775,62 M	21.488,66 M	23.613,05 M	23.259,78 M
Belanja Modal	18.355,38 M	18.041,25 M	9.931,32 M	12.923,90 M	13.703,22 M	11.551,93 M	3.173,22 M	6.865,83 M	8.808,19 M	8.585,58 M
Belanja Modal	18.355,38 M	18.041,25 M	9.931,32 M	12.923,90 M	13.703,22 M	11.551,93 M	3.173,22 M	6.865,83 M	8.808,19 M	8.585,58 M
Belanja Lainnya	13.088,35 M	13.788,86 M	16.860,59 M	18.052,18 M	15.055,08 M	10.561,93 M	15.452,42 M	14.448,31 M	14.738,44 M	13.708,72 M
Belanja Bantuan Keuangan	846,43 M	563,91 M	498,01 M	479,76 M	356,45 M	839,08 M	371,27 M	387,58 M	484,76 M	356,45 M
Belanja Bunga	76,00 M	76,00 M	119,87 M	789,54 M	258,00 M	60,79 M	62,30 M	86,12 M	270,63 M	229,70 M
Belanja Subsidi	4.846,26 M	5.579,19 M	4.083,27 M	5.596,37 M	6.016,10 M	2.782,93 M	3.628,17 M	4.355,29 M	6.278,33 M	5.539,66 M
Belanja Hibah	2.300,75 M	2.575,05 M	3.436,64 M	3.255,04 M	2.963,13 M	2.475,19 M	1.881,88 M	2.651,07 M	2.639,33 M	3.215,21 M
Belanja Bantuan Sosial	4.466,44 M	4.805,80 M	6.589,77 M	5.194,94 M	4.556,98 M	4.402,33 M	4.800,62 M	6.528,36 M	5.035,40 M	4.367,71 M
Belanja Tidak Terduga	552,48 M	188,90 M	2.133,03 M	2.736,53 M	904,43 M	1,61 M	4.707,94 M	439,89 M	29,98 M	0,00 M
Pembiayaan Daerah	6.125,34 M	-2.585,56 M	779,50 M	-1.691,48 M	233,12 M	3.847,10 M	1.366,83 M	5.773,75 M	6.174,74 M	5.295,32 M
Penerimaan Pembiayaan Daerah	14.311,61 M	5.760,15 M	12.009,08 M	5.022,42 M	9.400,44 M	11.781,96 M	5.582,82 M	11.914,20 M	10.701,36 M	9.167,74 M
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.171,69 M	5.500,00 M	2.024,16 M	4.035,85 M	7.977,76 M	9.755,08 M	1.203,97 M	5.165,70 M	9.721,72 M	9.167,74 M
Penerimaan Pinjaman Daerah	2.139,92 M	260,15 M	9.984,92 M	986,56 M	1.422,68 M	2.025,16 M	2.903,53 M	6.744,33 M	979,25 M	0,00 M
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	4,17 M	0,39 M	0,00 M						
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	1,72 M	0,52 M	0,00 M	0,00 M	0,00 M				
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.186,26 M	8.345,71 M	11.229,58 M	6.713,90 M	9.167,32 M	7.934,86 M	4.215,99 M	6.140,45 M	4.526,63 M	3.872,42 M
Pembentukan Dana Cadangan	0,00 M	95,11 M	95,68 M	0,00 M	0,00 M	0,00 M				
Penyertaan Modal Daerah	7.802,61 M	7.812,06 M	10.995,93 M	5.535,96 M	7.209,03 M	7.752,20 M	4.086,68 M	5.906,82 M	3.492,07 M	2.814,87 M
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33,65 M	33,65 M	33,65 M	927,94 M	1.782,27 M	87,55 M	33,63 M	33,63 M	1.034,56 M	1.057,55 M
Pemberian Pinjaman Daerah	350,00 M	500,00 M	200,00 M	250,00 M	176,02 M	0,00 M	0,00 M	200,00 M	0,00 M	0,00 M
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M									

Data laporan keuangan DKI Jakarta selama tahun 2019-2020 menjelaskan bahwa :

1. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selama periode pandemi COVID-19, Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan signifikan dalam PAD, yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi. Data menunjukkan bahwa PAD mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020 dan hanya sedikit mengalami perbaikan dalam dua tahun berikutnya. Ini disebabkan oleh berkurangnya aktivitas bisnis dan penutupan sementara berbagai sektor usaha.



2. Ketidak seimbangan Anggaran

Penurunan PAD menyebabkan ketidakseimbangan anggaran di tingkat daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan penyesuaian anggaran dengan mengurangi beberapa alokasi untuk sektor yang tidak prioritas dan memfokuskan kembali anggaran pada sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ketidakseimbangan ini juga memaksa pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menutupi defisit yang meningkat.

3. Pergeseran Prioritas Belanja

Prioritas anggaran selama pandemi mengalami perubahan yang signifikan, dengan peningkatan alokasi untuk sektor kesehatan, seperti pengadaan alat pelindung diri, pembangunan fasilitas kesehatan, dan program vaksinasi massal. Selain itu, pemerintah daerah juga meningkatkan belanja modal untuk proyek infrastruktur yang bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi.

4. Peningkatan Pembiayaan Daerah

Pemerintah DKI Jakarta mengadopsi langkah-langkah untuk meningkatkan pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah dan penerbitan obligasi. Langkah ini diambil untuk membiayai proyek-proyek yang dianggap strategis dan mendukung pemulihan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur publik.

PEMBAHASAN

1. Dampak Ekonomi Pandemi:

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi regional DKI Jakarta. Berkurangnya aktivitas ekonomi dan pembatasan sosial yang ketat menurunkan pendapatan daerah. Meski ada beberapa upaya pemulihan, tingkat pendapatan belum kembali seperti kondisi sebelum pandemi. Tantangan ini memerlukan strategi pemulihan ekonomi yang lebih komprehensif dan inovatif untuk mengatasi masalah struktural dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

2. Prioritas Kebijakan Pemerintah Daerah:

Pergeseran kebijakan anggaran menunjukkan respons yang cepat dari pemerintah daerah dalam menghadapi krisis kesehatan. Namun, pengalihan anggaran yang signifikan ke sektor kesehatan juga menimbulkan konsekuensi bagi sektor lain yang membutuhkan perhatian. Hal ini menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang fleksibel dan responsif, serta peningkatan kapasitas manajerial untuk menghadapi situasi darurat.

3. Upaya Pemulihan Keuangan Daerah:

Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi melalui stimulus dan investasi infrastruktur. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan pemulihan ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan pencapaian tujuan jangka panjang.



4. Ketahanan Fiskal Daerah:

Pandemi ini juga menjadi ujian bagi ketahanan fiskal daerah. Untuk meningkatkan ketahanan, diperlukan langkah-langkah seperti diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan kerjasama dengan sektor swasta. Ketahanan fiskal yang kuat akan membantu pemerintah daerah lebih siap menghadapi krisis serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan DKI Jakarta, terutama dalam hal penurunan PAD dan peningkatan defisit anggaran. Upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan menunjukkan dampak positif, meskipun belum sepenuhnya mengembalikan kondisi keuangan seperti sebelum pandemi. Penting untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan kebijakan pemulihan yang efektif untuk stabilitas keuangan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, H. F. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 147–156. <https://doi.org/10.47776/Mizania.V2i1.508>
- Asian Development Outlook. (N.D.). *Ekonomi Indonesia Melambat Di 2020 Akibat Covid-19, Pulih Bertahap Di 2021*. www.adb.org. <https://www.adb.org/id/news/indonesia-s-economic-growth-slow-2020-covid-19-impact-gradual-recovery-expected-2021>
- Fachenda Itsnain Naufal Zuhdi. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 - 2021*.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Apbd Dki Jakarta Tahun 2023*. djpk.kemenkeu.go.id. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2023&provinsi=09&pemda=00>
- Nasution, N. A. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Aktual*, 21(2), 1–10. <https://doi.org/10.47232/aktual.V21i2.382>
- Puji Wibowo. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Pajak Dan Keuangan Negara*, 4. https://www.researchgate.net/publication/363192564_Analisis_Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Provinsi_Dki_Jakarta_Sebelum_Dan_Sesudah_Pandemi_Covid-19
- Rawis, S. D., Manossoh, H., & Pusung, R. J. (2020). (*Apbd*) *Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2016-2018)*. 8(4), 805–814.
- Sinambela, E., & Pohan, A. K. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 53(9), 1689–1699. journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/2056/2050



Siti Nur Aeni. (2022). *Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi*. Katadata.Co.Id.
<https://Katadata.Co.Id/Berita/Nasional/62130e3d98f90/Pandemi-Covid-19-Dan-Dampaknya-Terhadap-Ekonomi>

Sri Pujianti. (N.D.). *Mk: Uu Covid-19 Berlaku Paling Lama Hingga Akhir Tahun Ke-2 Sejak Diundangkan*.
<https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=17726> Wwww.Mkri.Id.